

ABSTRAK

Migrasi Iregular yang terjadi di Selat Inggris mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2018 dan tidak akan berlalu dalam waktu cepat. Metode migrasi iregular yang digunakan oleh para pelancong selama tujuh tahun terakhir pun tidak pernah diprediksi sebelumnya karena tidak pernah terjadi di tahun-tahun yang lalu. Sebagai respon dari peningkatan drastis migrasi iregular, Britania Raya dan Prancis memutuskan untuk memformulasikan suatu perjanjian bilateral yang bernama Perjanjian Sandhurst. Perjanjian ini memiliki tujuan utama untuk menanggulangi migrasi iregular serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan proses implementasi Perjanjian Sandhurst dalam rangka penanggulangan migrasi iregular periode 2018-2025. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah atau masalah penelitian adalah berasal dari sumber primer, seperti wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan Diplomat Indonesia bernama Derian Antonio yang berasal dari Divisi Amerika Eropa di Kementerian Luar Negeri. Data penelitian juga penulis ambil dari sumber sekunder, seperti studi literatur, diantaranya adalah artikel ilmiah, laporan resmi pemerintah, berita, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perjanjian Sandhurst diwujudkan melalui enam bentuk kerja sama utama, yaitu penguatan keamanan perbatasan, pengelolaan suaka, perlindungan anak tanpa pendamping, koordinasi administratif melalui *liaison officer*, kerja sama dengan negara asal dan negara transit, serta kerja sama pendanaan. Implementasi tersebut berhasil meningkatkan kapasitas operasional kedua negara melalui penguatan patroli, penggunaan teknologi pengawasan, peningkatan pertukaran informasi, serta pemberantasan jaringan penyelundupan manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kerja sama bilateral melalui Perjanjian Sandhurst didasarkan oleh kesamaan posisi dan pertukaran kepentingan yang menghasilkan komunikasi, konsultasi, negosiasi yang pada akhir tahapannya menghasilkan suatu kesepakatan bersama atau *legal framework* berupa dokumen perjanjian. Proses pembentukan Perjanjian Sandhurst juga mengandung unsur koordinasi kebijakan antara Britania Raya dan Prancis dalam menanggulangi migrasi iregular.

Kata Kunci: Perjanjian Sandhurst, Migrasi Iregular, Kerja Sama

ABSTRACT

Irregular migration across the English Channel has increased significantly since 2018 and is unlikely to disappear in the near future. The methods used by migrants to carry out irregular migration were also previously difficult to predict because it never happened before this years. In response to the drastic increase in irregular migration, the United Kingdom and France decided to formulate a bilateral agreement known as the Sandhurst Treaty. The main objective of this agreement is to address irregular migration and strengthen bilateral relations between the two countries. This study aims to analyze and explain the implementation process of the Sandhurst Treaty in addressing irregular migration during the 2018–2025 period. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. The data used to answer the research question were obtained from primary sources, such as interviews. I am interviewing Indonesian diplomat name Derian Antonio who works in American-Europe Division in Foreign Ministry. In addition, the research also relies on secondary sources, including literature studies such as academic articles, official government reports, news articles, and other relevant sources. The findings show that the implementation of the Sandhurst Treaty has been carried out through six main forms of cooperation: strengthening border security, asylum management, protection of unaccompanied minors, administrative coordination through liaison officers, cooperation with countries of origin and transit countries, and financial cooperation. This study concludes that the implementation of bilateral cooperation through the Sandhurst Treaty was based on shared positions and the exchange of interests between the United Kingdom and France. These processes involved communication, consultation, and negotiation, which ultimately resulted in a mutually agreed legal framework in the form of a bilateral treaty. The formulation of the Sandhurst Treaty also involved an element of policy coordination between the United Kingdom and France in addressing irregular migration.

Keywords: Sandhurst Treaty, Irregular Migration, Cooperation